

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi Cepat Tanggap atau yang biasa disebut dengan ACT merupakan sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Pada 21 April 2005, ACT mulai berdiri sah secara hukum dengan berdomisili di Kota Tangerang.¹ ACT termasuk dalam kategori *non-governmental organization* (NGO) atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dengan visi “Menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.”² ACT tampil sebagai pelopor dalam menumbuhkan jiwa-jiwa kerelawanan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Tanpa membedakan satu sama lain, seluruh korban bencana baik itu bencana alam maupun konflik dirangkul bersama-sama, mulai dari dalam negeri hingga mancanegara.³ Selain itu, ACT juga sekaligus menjembatani silaturahmi antar masyarakat, antar umat, antar kelas sosial masyarakat, agar ketika semuanya sudah terjalin, maka

¹ Lihat <https://act.id/tentang/legal> untuk penjelasan terkait Legal ACT. Diakses pada 14 Maret 2018

² Lihat https://act.id/tentang/visi_misi untuk penjelasan terkait Visi Misi ACT. Diakses pada 14 Maret 2018

³ Dyah Sulistiowati, “ACT Raih Penghargaan iNews Maker Awards 2017”, ACT, diakses dari <https://act.id/news/detail/act-raih-penghargaan-news-maker-awards-2017>, pada 12 Maret 2018

segala permasalahan termasuk masalah kemanusiaan dapat diselesaikan.

Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ACT dilahirkan oleh berbagai bencana yang terjadi, mulai dari bencana alam, kemiskinan, kelaparan, konflik dan bahkan sulitnya akses pendidikan juga masuk ke dalam perhatian ACT. Bukan hanya yang terjadi di Indonesia saja, namun juga yang terjadi di seluruh permukaan bumi ini. Ketika keadaan emergensi memanggil, ACT hadir dengan menyalurkan bantuan seperti relawan dan logistik.

ACT memulai kiprahnya di dalam negeri sejak bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Setelah itu ACT terus aktif melanjutkan aksinya dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia seperti gempa Yogyakarta (2006), gempa Padang (2007), banjir Situ Gintung (2009), longsor Banjarnegara (2010), jatuhnya pesawat Sukhoi di Bogor (2012) dan lain sebagainya.

Begitu juga halnya dengan di dunia internasional, aksi yang dilakukan ACT di berbagai belahan dunia diawali oleh setiap tragedi kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas di berbagai negara.⁴ Berkat beberapa program yang sudah dilakukannya di dunia internasional, pada akhirnya ACT dengan mantap mendedikasikan diri sebagai duta kemanusiaan global di tahun 2012. Hingga saat ini, ACT pun sudah menjangkau lebih dari 48 negara, bahkan telah membentuk jaringan *representative person* serta memiliki kantor sendiri yang berlokasi di Turki.

⁴ Lihat <https://act.id/tentang/sejarah> untuk penjelasan terkait Sejarah ACT. Diakses pada 14 Maret 2018

Belum optimalnya peran kemanusiaan oleh aktor utama seperti negara, juga perhimpunan negara-negara di dunia ini, mengharuskan NGO kemanusiaan seperti ACT mengambil satu langkah lebih maju agar penderitaan tidak terlalu lama dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah dan organisasi seperti PBB⁵ yang belum mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan sendirian, mengharuskan ACT yang berperan sebagai wakil masyarakat Indonesia untuk memberikan perhatian lebih. ACT mempercayai bahwa untuk membuat dunia yang dipenuhi dengan kedamaian, segala permasalahan kemanusiaan harus dapat diselesaikan, yaitu dengan menerapkan filantropi global dan voluntarisme.

Sejak didirikan 12 tahun yang lalu, ACT didukung oleh para aktivis dan relawan dengan latar belakang yang berbeda-beda, terutama berasal dari masyarakat yang memiliki jiwa kerelawanan tinggi. Seperti tim petugas medis yang berprofesi sebagai dokter, perawat, ahli gizi untuk menangani masalah kesehatan. Selain itu ada pula *chef*, para buruh, para ulama bahkan sampai *public figure* yang juga ikut andil dalam setiap kegiatan ACT. Selain karena memang ACT sering mengajak para *public figure* untuk berpartisipasi dalam menyuarakan isu kemanusiaan melalui media sosial. Dalam mewadahi para partisipan di dalamnya, ACT membentuk Masyarakat Relawan Indonesia (MRI), sebuah organisasi masyarakat yang mana aktivis serta relawan yang ada di dalam MRI akan secara otomatis menjadi bagian dari ACT. Pada dasarnya, tidak ada persyaratan khusus untuk bergabung di dalam ACT, sehingga akan ditemukan berbagai macam latar belakang profesi atau pekerjaan.

Demi mencapai misi, ACT melakukan banyak aksi seperti aksi solidaritas untuk meningkatkan

⁵ Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)

awareness dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap setiap tragedi yang terjadi. Aksi tersebut seringkali dilakukan di berbagai daerah di Indonesia bersama para relawan dari MRI. Seperti yang pernah dilakukan di Banda Aceh, Medan, Jakarta, Semarang, Makasar, Bandung, dan Yogyakarta dalam *event Car Free Day* (CFD). Dalam aksi solidaritasnya, beragam kegiatan dilakukan diantaranya dengan orasi, pembacaan puisi, bernyanyi diiringi alat musik, menggelar teatrical, menggambar dalam kanvas dan penggalangan donasi.⁶

ACT juga beberapa kali menyelenggarakan diskusi permasalahan kemanusiaan, salah satunya adalah acara Ngobrol Kemanusiaan (Ngokem) yang biasanya mengundang berbagai pihak seperti *public figure* dengan jiwa sosial kemanusiaan yang tinggi sebagai tamu. Bahkan untuk memaksimalkan aksinya, ACT juga membuat iklan (*TV commercial*) sebagai bagian dari amunisi pembelaan untuk menyuarakan kemerdekaan di Palestina.

Selain melakukan aksi secara *offline*, ACT juga melakukannya secara *online*, seperti aktif dalam menggunakan media sosial. Sebagaimana yang diketahui, globalisasi sangat memengaruhi penggunaan internet khususnya untuk media sosial di kalangan masyarakat saat ini. Maka dari itu, ACT memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan mulianya. ACT dapat dengan mudah ditemukan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Youtube. Selain membangkitkan nama ACT di masyarakat, informasi terhadap penderitaan para korban di luar sana akan tersampaikan dengan cepat dan tepat, mengingat informasi tersebut langsung disampaikan oleh para relawan yang berada di lokasi kejadian sebagai penyalur bantuan dan

⁶ Muhajir Arif Rahmani, "Serentak, ACT Gelar Aksi Solidaritas Ghouta – Syria di CFD", ACT, diakses dari <https://act.id/news/detail/serentak-act-gelar-aksi-solidaritas-ghouta-syria-di-cfd>, pada 18 Maret 2018

juga saksi hidup atas berbagai macam peristiwa kemanusiaan.

Sebagai sebuah lembaga kemanusiaan, ACT banyak berperan khususnya dalam penyaluran bantuan. Krisis kemanusiaan yang banyak terjadi sepanjang abad ke 21 ini menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai sebuah urgensi. Bantuan yang biasa disalurkan oleh ACT umumnya berbentuk seperti relawan, bantuan pangan, kesehatan, bantuan sandang untuk menghadapi musim dingin, bantuan pendidikan, dan sebagainya.⁷ Dalam menyalurkannya, ACT memiliki beberapa program⁸ yaitu, *Winter Aid*, *Help Syria*, *Help Rohingya*, *Food Somalia*, *Save Palestine*, Kapal Kemanusiaan, dan Asa Anak Suriah yang sampai detik ini masih terus berjalan. Di Palestina sendiri ACT telah bergerak sejak tahun 2006, sehingga tidak heran jika semakin banyak juga program bantuan yang dikembangkan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial.⁹ Program-program tersebut dibuat berdasarkan bantuan yang memang dibutuhkan di lokasi tujuan, sehingga manfaatnya akan maksimal. Sebelum menyalurkan bantuan, pihak ACT juga membaca peta konflik secara seksama untuk meminimalisir kegagalan dan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Dalam melaksanakan berbagai programnya, ACT bekerja sama dan dibantu oleh beberapa pihak baik dari

⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh reporter Yahya G Nasrullah dengan pihak ACT. Lihat <https://www.hidayatullah.com/berita/wawancara/read/2017/02/25/112422/act-mengaitkan-lembaga-kemanusiaan-dengan-isis-adalah-konyol.html> untuk wawancara lengkapnya. Diakses pada 10 Maret 2018

⁸ Lihat <https://act.id/program> untuk penjelasan terkait program-program ACT yang sedang berjalan. Diakses pada 14 Maret 2018

⁹ Lihat <https://act.id/palestina> untuk penjelasan terkait aksi ACT di Palestina. Diakses pada 14 Maret 2018

dalam dan juga luar negeri. ACT mendapatkan dukungan dan bekerja sama tidak hanya dengan organisasi, namun juga perusahaan-perusahaan serta media.¹⁰ Beberapa diantaranya adalah kerja sama dengan *Qatar Foundation* yang dimulai sejak tahun 2014. Ada pula kerja sama dengan NGO kemanusiaan terbesar di Turki, *İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH)*, yang menjadi perantara untuk menyalurkan bantuan internasional ke Suriah. Lalu, untuk mendirikan sumur bor di Gaza, kerja sama dilakukan dengan *Palestinian Welfare House (PWH)* pada tahun 2015. Kemudian, ACT juga bekerja sama dengan komunitas *Us-Sunnah* dari Amerika Serikat untuk distribusi bantuan ke Rohingya. Di Jepang, ACT melakukan kerja sama dengan Ikatan Perawat Muslim Indonesia (IPMI) untuk melakukan aksi sosial kemanusiaan di luar maupun dalam negeri. Serta, berkat keaktifan di dunia maya, ACT melakukan kerja sama dengan komunitas *online* seperti *Solidarity Cyber Action (SCA)* dan *Lifeforummah* yang sama-sama bergerak dalam bidang kemanusiaan, dengan membentuk *Huriyah Project*. Tidak hanya itu saja, ACT juga melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, beberapa diantaranya seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia Mesir, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. ACT pun juga ikut andil dalam kegiatan pertemuan PBB bersama beberapa NGO dari berbagai negara untuk membahas bantuan terhadap konflik Rohingya.

Aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan ACT tidak jarang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Seperti apresiasi yang diberikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. ACT juga meraih

¹⁰ Lihat <https://act.id/mitra> untuk penjelasan terkait daftar mitra ACT. Diakses pada 14 Maret 2018

penghargaan sebagai “Lembaga Kemanusiaan Terpopuler” yang diberikan oleh *iNews Maker Awards* 2017 sebagai ajang penghargaan bagi insan dan institusi yang telah berkiprah dalam memajukan Indonesia melalui serangkaian terobosan dan program kerja yang dilakukan.¹¹

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu negara yang terbilang aktif dalam penanganan isu kemanusiaan. Demi melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia terus-menerus berupaya membantu menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dunia seperti melalui diplomasi kemanusiaannya. Indonesia selalu berupaya untuk memprioritaskan pembahasan mengenai isu-isu kemanusiaan di berbagai kesempatan, seperti pada pertemuan internasional.

Salah satu alasan dibalik diplomasi kemanusiaan yang Indonesia lakukan sebenarnya juga tidak terlepas dari adanya tekanan dalam negeri. Baik itu yang datang dari masyarakat secara individu dan juga yang berkelompok, seperti NGO. Salah satunya adalah ACT yang menambah sumberdaya untuk membantu menangani persoalan kemanusiaan. Meski fokus ACT adalah penyaluran bantuan yang mungkin tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara langsung, namun setidaknya bantuan tersebut mampu untuk mengurangi penderitaan para korban. Dengan adanya campur tangan dari NGO seperti ACT juga, nama Indonesia akan terangkat dan secara tidak langsung hal tersebut akan mengharumkan nama Indonesia. Dunia kemudian akan melihat Indonesia sebagai negara besar yang memiliki peran sosial signifikan. Aksi sosial kemanusiaan ACT yang mampu melintasi batas geografi secara tidak

¹¹ Dyah Sulistiowati, op.cit.

langsung juga akan mendekatkan jarak negara-negara dalam diplomasi kemanusiaan. Hal itu bisa menurunkan tensi tinggi politik dunia, sekaligus bisa merekatkan hubungan informal Indonesia dengan negara-negara penerima manfaat dari program yang dijalankan.¹²

Dalam menangani isu-isu kemanusiaan saat ini, aktor yang dibutuhkan bukan hanya negara saja, karena peran aktor non-negara seperti NGO juga sangat diperlukan. NGO telah menjadi aktor yang sangat influensial dalam dunia politik sejak lebih dari tiga dekade terakhir. Tidak ada lagi yang bisa mengabaikan pentingnya NGO dalam hal dampak, sumber daya, keahlian, dan pengetahuan mereka.¹³

Sehingga, dalam menangani isu kemanusiaan ini, akan lebih baik lagi kiranya jika negara dan NGO tidak berjalan sendiri-sendiri. Terlebih, dengan adanya tekanan serta kritik terhadap efektivitas bantuan luar negeri dari masyarakat, pemerintah akan lebih mudah mendistribusikan bantuan luar negeri dengan disalurkan melalui NGO. Keahlian yang dimiliki NGO juga dapat dipastikan akan jauh lebih mumpuni. Baik NGO maupun pemerintah memahami bahwa mereka dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif seraya berjalan beriringan melalui kerja sama, khususnya untuk menangani isu-isu kemanusiaan internasional.

¹² N. Imam Akbari, "Kurban dan Diplomasi Kemanusiaan", ACT, diakses dari <https://act.id/news/detail/kurban-dan-diplomasi-kemanusiaan>, pada 12 Maret 2018

¹³ Youngwan Kim. *"The Unveiled Power of NGOs: How NGOs Influence States' Foreign Policy Behaviors"*, PhD (Doctor of Philosophy) Thesis, University of Iowa, 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu: **“Bagaimana Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai pelaksana diplomasi kemanusiaan Indonesia?”**

C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis konsep guna mendukung penelitian agar dapat di analisis dengan baik dan sistematis. Konsep yang digunakan adalah *non-governmental organization* (NGO) dan *multi-track diplomacy*.

1. *Non-Governmental Organization*

Dalam proses hubungan internasional saat ini, aktor yang berperan di dalamnya tidak lagi terpaku hanya pada aktor formal seperti negara atau organisasi pemerintah, namun telah meluas dan melibatkan aktor non formal seperti organisasi non-profit atau *non-governmental organization* (NGO). NGO umumnya merujuk pada sebuah kelompok (atau organisasi) yang keanggotaan dan aktivitas organisasinya melintasi batas-batas nasional.¹⁴

Istilah NGO pertama kali muncul pada tahun 1945 setelah dibentuknya PBB. Di dalam PBB, semua jenis badan privat dikategorikan sebagai NGO, yang mana mereka harus independen atau tidak terikat dengan pemerintah, tidak bersaing dengan pemerintah

¹⁴ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, 2017, hlm. 197

seperti berperan sebagai partai politik, dan harus bersifat *non-profit-making* serta *non-criminal*.¹⁵

Menurut definisi Peter Willets, ada tiga karakteristik yang dapat mengkategorikan sebuah organisasi sebagai NGO. Pertama, NGO tidak boleh berbentuk atau terlibat dengan partai politik atau berafiliasi dengan segala organisasi yang berhubungan dengan pemerintah. Mereka juga tidak boleh memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan politik melalui kegiatannya. Kedua, mereka tidak boleh menghasilkan keuntungan. Ketiga, kelompok kriminal juga harus dikecualikan, walaupun mereka tidak berhubungan dengan pemerintah, namun NGO harus memiliki tujuan yang baik.¹⁶ Secara garis besar, NGO dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang terus-menerus bekerja sama secara sukarela dan independen dengan memiliki tujuan yang sama tanpa berusaha untuk meraup keuntungan pribadi dalam melakukan aktivitasnya.¹⁷

David Lewis memberikan lima karakteristik yang dimiliki oleh NGO. Pertama, bersifat formal, organisasi yang dilembagakan dalam bentuk pertemuan rutin, kantor pendukung dan kelengkapan organisasi lainnya. Kedua, bersifat privat, artinya terpisah dari pemerintah secara institusi meskipun dalam melakukan aksinya, ada dukungan dari pemerintah. Ketiga, berorientasi nirlaba, jika aktivitas NGO menghasilkan kelebihan dana, maka dana ini tidak diperuntukkan bagi pemilik. Keempat, mengelola sendiri atau *self-governing*, artinya mampu *memanage* urusan sendiri. Kelima, bersifat sukarela,

¹⁵ Rai Technology University, *Concepts and Functions of NGO*, Bangalore, hlm. 2

¹⁶ Youngwan Kim, op.cit., hlm. 12

¹⁷ Rai Technology University, op.cit., hlm. 4

jika tidak dapat mempekerjakan staf yang sukarela, setidaknya ada beberapa derajat partisipasi yang sukarela dalam manajemen organisasi.¹⁸

Dalam buku *International Relations and World Politics* yang ditulis oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, mereka mengidentifikasi empat kategori NGO yang perlu diketahui dalam mempelajari studi Hubungan Internasional dan politik dunia. Pertama, *private-sector economic organization*. Meskipun kebanyakan pendapat menyatakan bahwa istilah NGO diperuntukkan bagi organisasi non-profit, namun dalam hal ini Viotti dan Kauppi memberikan label tersebut bagi seluruh organisasi non-pemerintah, termasuk juga *multinational corporations* (MNCs). Kedua adalah *NGOs with explicit political, economic, or social agendas*, contohnya seperti Amnesty International dan Greenpeace sebagai NGO transnasional. Ketiga adalah *non-governmental organizations that attempt to avoid overtly political roles*, seperti organisasi kemanusiaan semacam Doctors Without Borders. Jika organisasi seperti itu ternyata terlibat dalam politik dan memihak rakyat sipil dan konflik internasional, kemungkinan besar mereka tidak bisa mendapatkan akses masuk ke area konflik. Terakhir, Viotti dan Kauppi mengikutsertakan kelompok teroris serta organisasi dan jaringan kriminal. Hal ini bertolak belakang dengan karakteristik yang disampaikan oleh Willets. Mereka memasukkan teroris dan organisasi kriminal kedalam kelompok NGO yang menolak adanya aturan hukum

¹⁸ David Lewis, "Non-Governmental Organization: Development and Management", dalam Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*, 2017, hlm. 198

serta merepresentasikan sisi bawah atau *darkside* dari kemunculan *global civil society*.¹⁹

Menurut David Korten, berdasarkan NGO yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yang memiliki peran berbeda. Generasi pertama adalah generasi bantuan dan kesejahteraan, yang mana NGO berperan untuk memberikan bantuan dalam menangani bencana baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun konflik seperti perang. Seperti pendistribusian pangan, penyediaan tempat penampungan dan tim kesehatan. Generasi kedua adalah generasi keswadayaan dalam skala lokal, yang mana NGO berperan untuk melakukan pengembangan masyarakat dengan menekankan pada swadaya lokal. Lalu generasi ketiga yaitu generasi pembangunan yang berkelanjutan, yang mana NGO berperan dalam mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah namun kedua pihak tetap saling bekerja sama.²⁰

Dalam pendefinisian NGO, sebenarnya ada semacam kontestasi, namun secara universal didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, dan melakukan pengembangan masyarakat.

Dalam pola hubungan dengan pemerintah, ACT dapat dikategorikan sebagai NGO yang independen. Sejak lebih dari sepuluh tahun silam,

¹⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics Fourth Edition", Pearson Education, 2009, hlm. 11-13

²⁰ Yusdiyanto, "Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 3

pemerintah tidak merasa terancam atas kehadirannya (*autonomous/benign neglect*). Dilihat dari berbagai aksi yang telah dilakukan oleh ACT dan respon pemerintah, dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap program-program yang dijalankan (*facilitation/promotion*). Lalu, yang terakhir hubungan antara NGO dengan pemerintah yang terlihat jelas dalam konteks ACT adalah adanya kerja sama yang dilakukan dan menguntungkan kedua belah pihak (*collab/cooperation*).²¹

2. *Multi-Track Diplomacy*

Sebuah proses dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan, antara lain, dari peran yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk saling memengaruhi melalui kegiatan diplomasi. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional, termasuk dengan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional, aktor-aktor yang berperan dalam kegiatan diplomasi pun tidak lagi bergantung pada diplomat-diplomat pemerintah, tetapi peran diplomasi itu dapat juga dilakukan oleh aktor-aktor lain di luar pemerintah. Oleh karena itu, dalam studi Hubungan Internasional, dikenal juga konsep “Diplomasi Multi Jalur” (*Multi-Track Diplomacy*).²²

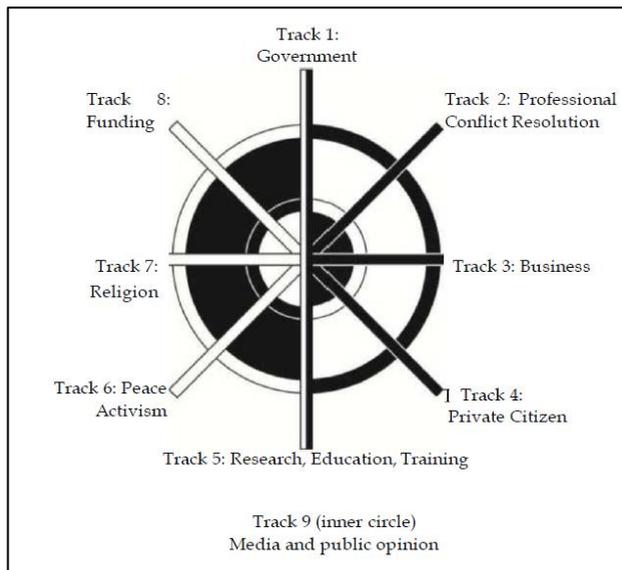
Multi-track diplomacy merupakan sebuah konsep diplomasi yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald dalam bukunya berjudul *Multi-Track Diplomacy: A System Approach*

²¹ Disampaikan pada *powerpoint* di kelas Kajian LSM (2017) oleh bapak Ade Ma’rup Wirasenjaya, S.IP, M.A

²² Simela Victor Muhamad, “Peran Asian Parliamentary Assembly Dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel”. *Politica* Vol. 8, No. 1 Mei, 2017, hlm. 59

to Peace yang diterbitkan pada tahun 1996. Dalam buku tersebut, mereka mengembangkan *track one* dan *track two* yang dibuat oleh Joseph Montville pada tahun 1982 menjadi sembilan *tracks* yang bertujuan untuk mencapai resolusi konflik seperti melalui dialog dan negosiasi, baik secara langsung maupun melalui mediasi.

Multi-track diplomacy terdiri dari *Track One: Government*, *Track Two: Professional Conflict Resolution*, *Track Three: Business*, *Track Four: Private Citizen*, *Track Five: Research, Education, Training*, *Track Six: Peace Activism*, *Track Seven: Religion*, *Track Eight: Funding*, dan *Track Nine: Media and Public Opinion*.



Gambar 2. Multi-Track Diplomacy

Track One: Government

Track one atau jalur pertama dapat disebut juga sebagai *official diplomacy* atau diplomasi resmi. De Magalhaes mendefinisikannya sebagai sebuah alat kebijakan luar negeri untuk menciptakan dan mengembangkan komunikasi antara pemerintah dari berbagai negara di dunia melalui perantara yang diakui bersama oleh masing-masing pihak. Jalur ini tentu saja dilakukan dalam level *government-to-government* dengan mengikuti aturan tertentu yang telah diterapkan. *Track one* biasanya menjadi alat utama kebijakan luar negeri suatu negara untuk menciptakan perdamaian dan seringkali dilakukan oleh para diplomat, pejabat tinggi pemerintah, dan kepala negara yang ditunjukkan untuk memengaruhi struktur kekuasaan politik.²³

Track Two: Professional Conflict Resolution

Track two dikenal juga sebagai *unofficial diplomacy* sebagaimana yang disebutkan oleh Joseph Montville. Jalur ini merupakan interaksi tidak resmi atau non-formal yang dilakukan antara sesama aktor non-negara atau para profesional seperti para akademisi, petinggi-petinggi NGO, aktivis sosial, bahkan *public figure*, yang dapat melakukan diplomasi dengan cara yang lebih santai ketimbang aktor formal. Biasanya, pada *track two* ini mereka melakukan sesuatu yang entah itu belum atau tidak atau bahkan takut untuk dilakukan oleh pemerintah. Dalam aksinya untuk menciptakan perdamaian, para profesional di dalamnya dapat melakukan mulai dari resolusi konflik, menuangkan pemikirannya melalui tulisan

²³ Jeffrey Mapendere, "Track One and a Half Diplomacy and the Complimentary of Tracks", Culture of Peace Online Journal, 2 (1), hlm. 67

atau seminar, dan juga dapat terjun langsung ke dalam aksi kemanusiaan dan penyelesaian konflik. Konsep jalur kedua ini diciptakan bukan sebagai pengganti dari jalur pertama, melainkan sebagai alternatif dan pelengkap, terutama jika terjadi kendala pada jalur pertama. Aktor-aktor dalam jalur ini tidak terikat dengan kekuatan politik ataupun konstitusional manapun sehingga tidak ada kepentingan politik terselubung yang akan memengaruhi sudut pandang mereka.

Track Three: Business

Dalam *track three*, diplomasi dilakukan melalui bisnis atau kegiatan komersial untuk menghasilkan keuntungan ekonomi masyarakat dan negara, yang mampu untuk mengurangi tekanan kemiskinan ekonomi dan berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik sehingga dapat diciptakan perdamaian. Dalam jalur ini aktor yang berperan biasanya berada pada level *businessman-to-businessman*, sektor swasta, *free-enterprise*, dan juga *multinational corporations* (MNCs).

Menurut Diamond dan McDonald, para pebisnis kebanyakan tidak menyadari bahwa mereka mampu menjadi salah satu agen perdamaian. Padahal faktanya, negoisasi terkait dengan uang, sumber daya, serta tenaga kerja memerlukan diplomasi, yang akan dilakukan ketika para pebisnis mulai membuka usaha baru, maka upaya diplomatik bisnis internasional tersebut lah yang merupakan negosiasi perdamaian secara *de facto*.²⁴

²⁴ Randall Cuthbert, "North Korea: The Potential Application of Multi-Track Diplomacy to Conflict Resolution and Peace Building", Occasional Paper 16, Institute for Multi-Track Diplomacy, 2005, hlm. 25

Track Four: Private Citizen

Jalur keempat disebut juga sebagai *citizen diplomacy* yaitu diplomasi yang dilakukan oleh warga negara, sehingga dibandingkan dengan jalur-jalur lain, diplomasi pada jalur ini bersifat *grassroots* sebagaimana yang dijelaskan oleh Randall Cuthbert. Diplomasi ini cenderung berdampak positif pada keadaan manusia. Aktor yang terlibat berasal dari individu maupun kelompok non-formal seperti *private voluntary organizations*, *nongovernmental organizations*, dan *special-interest groups* yang memiliki kepentingan untuk mengadvokasi berbagai permasalahan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah sama sekali. Biasanya mereka terlibat dalam bidang-bidang seperti pertukaran budaya, kesehatan, agama, lingkungan hidup, dan juga pendidikan.²⁵ Secara singkat, para aktor dalam *track* ini melakukannya dengan, misalnya seseorang mempelajari budaya baru di negara lain dan kembali lagi ke negaranya dengan menerapkan budaya ataupun *skill* yang didapatkan tersebut.

Track Five: Research, Education, Training

Diplomasi pada jalur kelima biasanya berbentuk *research*, beasiswa atau pembelajaran, karena pendidikan merupakan bentuk pertukaran paling netral secara politik dan cenderung menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya seperti hadirnya institusi-institusi kecil ataupun NGO yang melakukan pelatihan edukasi guna melatih resolusi konflik. Menurut Diamond dan McDonald, dapat dilakukan dengan mengumpulkan mahasiswa ataupun

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27

sarjana profesional untuk memecahkan permasalahan seperti melalui program beasiswa.²⁶

Track Six: Peace Activism

Pada jalur keenam, diplomasi dilakukan oleh aktivis baik itu perseorangan atau berbentuk organisasi, dengan melalui advokasi terhadap isu-isu perdamaian dan lingkungan seperti pelucutan senjata, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, dan advokasi kelompok-kelompok kepentingan khusus mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu.²⁷ Jalur ini merupakan bagaimana kekuasaan dari individu-individu yang secara kolektif atau bersama-sama itu berusaha untuk mengubah sistem. Aktivisme sendiri dapat dikatakan sebagai jalur diplomasi yang kurang memiliki otoritas, kredibilitas, dan pengakuan oleh pemerintah dan organisasi yang berkuasa.²⁸

Track Seven: Religion

Diplomasi keagamaan merupakan upaya yang dilakukan oleh komunitas berbasis agama untuk mengingatkan orang-orang di seluruh dunia bahwa sistem agama dan kepercayaan adalah berlandaskan cinta damai dan bukannya kekerasan bahkan peperangan. Namun karena banyaknya ragam agama yang ada di dunia ini kemudian menciptakan batas pemahaman yang akan sulit dimengerti oleh setiap orang, tidak jarang terjadi salah sangka seperti

²⁶ Ibid., hlm. 30-31

²⁷ "What is Multi-Track Diplomacy?" diakses dari <http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/> pada 11 Desember 2018

²⁸ Randall Cuthbert, op.cit, hlm. 34

misalnya ketika para misionaris agama Kristen dicurigai melakukan Kristenisasi pada umat Muslim.²⁹

Track Eight: Funding

Aktor dalam jalur delapan adalah para filantropis baik itu individu maupun yayasan bahkan lembaga seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia, yang menyediakan pendanaan atau bantuan finansial untuk kegiatan yang berhubungan dengan misi *peacemaking*.

Track Nine: Media and Public Opinion

Diamond dan McDonald menyatakan bahwa "Tugas utama bidang komunikasi adalah menggunakan media cetak, visual, dan elektronik untuk menginformasikan dan melibatkan publik mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perdamaian, resolusi konflik, dan hubungan internasional." *Track* ini merupakan perdamaian melalui informasi yaitu bagian dari suara rakyat: bagaimana opini publik dibentuk dan diekspresikan oleh media cetak, film, video, radio, sistem elektronik, seni.³⁰ Contohnya adalah melalui film untuk memperbaiki perspektif buruk terhadap sesuatu yang terlanjur hadir dan tersebar di masyarakat, karena media merupakan titik terkuat untuk memengaruhi opini publik.³¹

Konsep *multi-track diplomacy* bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan internasional. Secara singkat, konsep ini menjelaskan bahwa dalam diplomasi diperlukan kerja sama antara aktor elit negara dengan aktor non-negara. Aktor

²⁹ Randall Cuthbert, op.cit, hlm. 37

³⁰ "What is Multi-Track Diplomacy?", op.cit.

³¹ Randall Cuthbert, op.cit, hlm. 40

negara adalah para diplomat yang dikirim khusus oleh pemerintahan sebuah negara, sedangkan aktor non-negara adalah seluruh elemen masyarakat sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak pemerintah negara lain ataupun pihak non pemerintah. Proses interaksi inilah yang kemudian memberikan kontribusi positif terhadap hubungan kedua negara, baik yang dirasakan secara langsung ataupun tidak.³²

D. Argumen Penelitian

ACT merupakan aktor non-tradisional independen yang memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur diplomasi baru dalam Hubungan Internasional, yaitu *unnoficial diplomacy*. Melalui keterlibatan para aktivis dan profesional di dalam setiap aksinya secara global, ACT mampu berperan sebagai pelaku diplomasi kemanusiaan Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Pelaksanaan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang dikategorikan sebagai aktor non-tradisional dapat berperan dalam melakukan diplomasi kemanusiaan.

³² Rudi Candra. *"Peran People To People Diplomacy Dalam Hubungan Diplomatik Indonesia-Mesir; Menelisik Fungsi Soft Power dalam Hubungan Kedua Negara (1998-2011)"*. Tesis S2 Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, 2013

F. Jangkauan Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian dengan rentang waktu yang diambil mulai dari kemerdekaan Indonesia sampai pada tahun 2018. Namun, dalam analisisnya akan difokuskan pada peristiwa sejak tahun 2005 sampai tahun 2018.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis menggunakan metode eksplanasi untuk menganalisis bagaimana peran NGO kemanusiaan yang dalam tulisan ini adalah ACT, untuk melakukan diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Dalam mengumpulkan data-datanya, penulis menggunakan teknik pengambilan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak ACT di kantor ACT cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai karya ilmiah yang dikumpulkan secara *offline* dan *online*, seperti buku, jurnal, tesis, tabloid, serta artikel dari berbagai laman web yang *inshaa Allah* terjamin kredibilitasnya.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mulai dari siapa itu ACT, apa yang menjadi alasan kemunculan ACT baik di dalam maupun luar negeri, kemudian siapa

saja aktor-aktor yang ada di dalam ACT beserta mitra diluar ACT, lalu menjelaskan secara singkat apa saja aksi dan program yang dilakukan dan bagaimana respon serta pengaruhnya bagi Indonesia. Setelah itu, dilanjutkan dengan membahas rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: Pada bab ini akan dibahas mengenai munculnya isu kemanusiaan global dan keadaanya saat ini. Lalu, dilanjutkan dengan bagaimana ACT muncul sebagai organisasi kemanusiaan global dengan membahas sejarah terbentuknya ACT, serta aksi dan berbagai program yang dilakukan di kancah internasional secara detail.

BAB III

: Bab ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana Indonesia mulai melakukan diplomasi kemanusiaan sejak pasca kemerdekaan sampai saat ini. Lalu, akan dijelaskan juga berbagai peran yang telah dilakukan Indonesia untuk menangani isu kemanusiaan global dengan menjadikannya sebagai salah satu fokus politik luar negeri Indonesia. Dalam sub-bab terakhir akan dipaparkan mengenai keterbatasan peran pemerintah

sehingga muncul jalur diplomasi baru dalam mengatasi isu kemanusiaan.

BAB IV

: Pada bab empat akan dilakukan analisis untuk membuktikan argumen penelitian terkait bagaimana peran strategis ACT sebagai aktor kemanusiaan global dalam melakukan diplomasi kemanusiaan Indonesia.

BAB V

: Bab terakhir akan berisi mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya.